# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini diantaranya:

1. (Amelda et al., 2024) yang berjudul, Implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa di desa telukbuyung kabupaten karawang, Implementasi SIKEUDES di Desa Telukbuyung dengan menggunakan model Edward III ada 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposis, dan struktur birokrasi. Komunikasi dalam implementasi aplikasi SISKEUDES yang menjadi keberhasilan perangkat desa telukbuyung dan pegawai desa lain semua komponen ini kompak dan berkomunikasi dengan baik untuk bertukar informasi dalam menyangkut operasional pelayanan, pelaporan keuangan desa telukbuyung. Sumber daya di desa Teluk buyung ini kurang efektif dalam mengoprasikan aplikasi Siskeudes, meskipun dalam pelaksanaanya dapat memudahkan dalam melakukan 18pengelolaan keuangan, namun masih ada keterbatasaan dari peralatan yang digunakan sering terjadi error, dan minimnya sumber daya aparat untuk mengoprasikan aplikasi Siskeudes. Disposisi berupa pemahaman pemerintah desa terhadap SISKEUDES ini sudah paham serta adanya rasa perduli yang tinggi dari kepala desa terhadap bawahannya (perangkat desa) untuk mengikuti beberapa pelatihan BIMTEK mengenai pengoperasian Siskeudes. Struktur Biokrasi pada aspek birokrasi implementasi Siskeudes di Desa Teluk

buyung secara mekanisme sudah berjalan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan SOP. Maka dari itu struktur birokrasi yang telah dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa Teluk buyung sudah baik, karena birokrasinya dilakukan sesederhana mungkin yang berdampak pada efektifnya komunikasi antar perangkat desa ataupun stakeholder lainya

2. (Zebua et al., 2022), dalam penelitian yang di lakukan oleh (Rachma Nur Alifah et al., 2022) yang berjudul Implementasi sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan di desa mekarmulya kabupateen karawang, menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang ini sudah berjalan baik karena sangat membantu dalam mempermudah pengelolaan data keuangan walaupun sarana dan prasarana yang ada kurang memadai tetapi tetap dapat dijalankan. Dalam penerapannya masih kurang, karena dalam penyampaian pertanggungjawaban baliho yang dicetak terlalupendek, untuk itu seharusnya perangkat desa yang bertanggungjawab khusus dalam implementasi pengelolaan keuangan di Desa Mekarmulya ini harus lebih memperhatikan hal-hal mendasar seperti pengecekan kembali dan bertindak aktif untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam penerapan Siskeudes daripada 17 pencatatan manual, dan untuk BPK diharapkan sarana dan prasarana dapat lebih diperhatikan serta ditambah persediaannya agar pemanfaatan aplikasi Siskeudes lebih berkualitas serta transparansi harus lebih dioptimalkan lagi terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui dana desa pengeluaran danpemasukan itu berapa serta untuk apa pengeluaran dana desa, karena

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

selain terpampang di baliho, masyarakat juga harus menanyakan transparansi langsung kepada pihak desa dan juga peran aktif yang harus dilakukan oleh pihak desa karena pasti ada masyarakat yang tidak paham dengan Siskeudes. Oleh karena itu, pihak desa harus melakukan sosialisasi aktif agar masyarakat paham apa itu Siskeudes.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu sistem keuangan desa (siskeudes) di desa sungai pandan hulu dan dapat mengatur tata kelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berbasis digital mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penelitian mengenai implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mampu menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara nyata. Dalam implementasinya, Siskeudes telah membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penggunaan aplikasi ini juga memudahkan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Berbagai definisi tentang kebijakan publik banyak diungkapkan oleh para pakar dah ahli kebijakan. Bahwa kebijakan publik itu adalah

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eskusinya berada pada level implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

Menurut John Dewer dalam Buku Hayat, 2018 : 13 mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk mengukur kebijakan publik, yaitu dengan cara bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

Apa yang dikatakan oleh John Dewey adalah sebuah eksperimen terhadap bentuk kebiajakn publik. Bahwa kebijakan publik itu dapat dilihat dari alternatif yang diambil dalam kebijakan. Dalam kebijakan publik ada banyak pilihan alternatif, sehingga pilihan kebijakan itu adalah kebijakan yang paling baik di anatara alternatif-alternatif yang lain. Atau pilihan yang paling baik diantara yang baik.

Banyak alternatif itu semakin baik dalam kebijakan publik. Hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik dan berkualitas atas kebijakan yang akan diambil. Tentunya, pilihan kebijakan publik adalah hampir dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik, karena pilihan alternatif itu meliputi aspek keterlaksanaannya kebijakan dengan baik atau tidak, indikator keberhasilan kebijakan juga dapat diukur dengan

berbagai pertimbangan dan pilihan lainnya. Dapat dipastikan bahwa pilihan kebijakan yang diputuskan adalah sudah diukur secara baik dan matang.

Di samping itu, John Dewey juga mengukur kebijakan dengan eksperimen terhadap keberhasilan kebijakan. Dampak yang ditimbulkan dari uji coba tersebut dijadikan sebagai barometer keberhasilan kebijakan. Ketepatan, kebaikan, keberhasilan dari uji coba akan menjadi indikator kebijakan itu berhasil atau tidak. Berbagai eksperimen dapat dilakukan serta dengan berbagai cara dan metode dapat pula dipraktikan.

Setiap kebijakan tidak serta merta langsung diputuskan. Kebijakan publik membutuhkan pengujian, penelitian, eksperimen dan pengulangan tahapan-tahapan kebijakan, sehingga kelemahan dan kekurangan dari kebijakan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Pengujian terhadap dampak kebijakan juga menjadi indikator dari keberhasilan kebijakan publik, yang mempunyai dampak positif yang dijadikan sebagai pilihan kebijakan. Aspek kemudharatan dan kemanfaatan kebijakan harus dikedepankan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh asal diputuskan, apa pun kondisi dan situasinya, karena setiap kebijakan mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat secara luas.

Sementara Hugwood & Gunn dalam Hayat 2018 : 14-17, berpendapat bahwa kebijakan publik itu terdiri dari 10 definisi, yaitu:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

1) Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu *(as a label for a field activity*); Merk atau label dari kebijakan akan menjadi sebuah kebersinambungan dan menjadi program rutin yang diselenggarakan serta melekat dalam diri kebijakan tersebut. Seperti kebijakan Bantuan Langsung Tunai ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi Preside. Label atau merk kebijakan akan menjadi program bagi pemerintah yang bisa ditandai sebagai bagian dari bentuk kebijakan publik. Label atau merek itulah yang akan dikenal dan mengena bagi masyarakat tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga memberikan kesan dan pesan yang memberikan dorongan partisipatoris aktif bagi masyarakat.
2) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang *dikehendaki (as an expression of general purpose or desired state of affairs)*; Pernyataan pemerintah tentang sebuah keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan umum dan/atau kepentingan masyarakat, baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi atau hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah melakukan kebijakan secara umum untuk kebaikan dan kepentingan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan kebijakan tersebut.
3) Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus *(as specific proposals)*; Usulan-usulan khusus yang muncul secara bottom up atau top down yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya yang menyangkut masalah kehidupan masyarakat yang dipandang perlu untuk diambil langkah konkret pengambilan keputusan yang melahirkan kebijakan dari pemerintah. Hal urgent yang datangnya dari masyarakat langsung atau dari pemerintah langsung dan bersifat penting, bisa dijadikan sebagai kebijakan publik.

4) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah *(as decision of government)*; Apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusannya, itu adalah kebijakan publik. Sekaligus keputusan pemerintah terhadap sesuatu itu adalah diam, maka diamnya pemerintah adalah kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah.
5) Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal *(as formal authorization)*; Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal adalah seperti kebijakan yang berbentuk regulasi dari pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta menjalankan tugas, pokok dan fungsinya yang dilakukan melalui pengesahan secara formal. Kebijakan-kebijakan yang bersifat formal biasanya mengikat bagi stakeholder dalam kebijakan serta konsekuensi yang mengikutinya. Misalnya keberadaan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat secara formal.
6) Kebijakan sebagai program *(as programme)*; Program-program pemerintah adalah bagian dari kebijakan publik. Setiap program yang dilakukan oleh pemerintah, baik program yang bersifat formal ataupun nonformal, dapat dikatakan sebagai kebijakan. Program kerja yang dihasilkan dari rencana kerja adalah bentuk kinerja untuk pembangunan pemerintah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan untuk kepentingan masyarakat dan membangun sinerga dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
7) Kebijakan sebagai keluaran *(as output)*; Kebijakan sebagai keluaran adalah setiap kebijakan publik pasti mempunyai keluaran yang diharapkan. Keluaran yang dihasilkan dari program kerja menjadi bagian dari kebijakan publik. Misalnya pembuatan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan

penanganan sampah, maka output peraturan yang dihasilkan menjadi keputusan dalam penanganan sampah. Keputusan peraturan tersebut masuk dalam katagori kebijakan publik.

8) Kebijakan sebagai hasil akhir *(as outcome)*; Begitu juga dengan outcome sebagai bagian dari kebijakan yang merupakan hasil akhir dari program-program kerja yang sudah dilakukan. Hasil akhir dari program atau pekerjaan dari pemerintah itu adalah bagian dari kebijakan.
9) Kebijakan sebagai suatu teori atau model *(as a theory or model)*; Dalam suatu pemerintahan, berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan yang menghasilkan berbagai output atau outcome untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan bagi pemerintah. Di samping itu, dalam penelitian, pengakajian, maupun analisis yang menghasilkan teori baru atau model baru atau temuan baru dapat dijadikan sebagai kebijakan untuk diterapkan dan dilaksanakan.
10) Kebijakan sebagai proses *(as process)*; Sebagai proses, kebijakan akan mempunyai keterkaitan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya. Setiap keputusan atau peraturan mempunyai sifat hirarki antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah kolaborasi kolektif yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pemerintah secara berkelanjutan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kebaikan bagi masyarakat. Proses yang terus berkesinambungan yang membentuk sebuah keputusan atau kebijakan.

Pengertian kebijakan publik mempunyai banyak tafsir dan makna, tetapi secara prinsip dan esensi adalah sama. Pandangan dan paradigma

kebijakan publik sebagai sebuah ilmu mempunyai cara pandang tersendiri bagi sebagian ahli.

Para ahli mengklasifikasian makna kebijakan publik ke dalam 4 sudut pandang, yaitu: Pertama, kebijakan sebagai keputusan. Beberapa makna/definisi mengenai kebijakan publik yang termasuk dalam sudut pandang ini. Thomas R. Dye dalam buku Hayat 2018 : 17, mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai *"Whatever governments choose to do or not to do."*, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Lebih lanjut, dikatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan.

Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan Anderson dalam Hayat 2018:17, mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Lain lagi dengan Edward III (dalam Agusino, 2016:136), yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai "What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs." Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward III (dalam Agusino, 2016:136)d lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Sementara David Easton dalam Hayat 2018 :19, mendefinisikan public policy sebagai : "The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values." Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh

pemerintah, baik itu berupa akan atau tidak akan melakukan sesuatu, itu semua sudah menjadi ketetapan dan keputusan pemerintah.

Kedua, kebijakan sebagai proses manajemen. Kebijakan sebagai proses manajemen merupakan serangkaian fase kerja dari para pejabat publik yang mencakup agenda setting, formulasi kebijakan dan legalitas pemerintah, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan reformulasi/terminasi.

Definisi kebijakan publik yang termasuk dalam sudut pandang ini ialah Easton dalam Hayat 2018 : 19, memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Peran pejabat/aktor-aktor publik sangat dominan. Dalam melakukan suatu kebijakan publik, pemerintah hanya mengandalkan pejabat publik saja, dari perencanaan awal sampai pada perumusan kebijakan untuk masyarakat sebagai wujud pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sementara Jonnes dalam Hayat 2018:17, memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Kegiatan pemerintah dalam melakukan perubahan suatu kebijakan publik secara bertahap tersebut merupakan suatu tindakan/sikap evaluasi dan reformasi yang dilakukan setelah melihat bagaimana hasilnya di dalam masyarakat. Hal itu

dilakukan pemerintah sebagai tindakan untuk memperbaharui kebijakan publik menjadi lebih baik lagi.

Di samping itu, Starling dalam Hayat 2018 : 20, public policy didefinisikan sebagai "The analysis of policy includes : conflict among policies, internal consistencies, impact on society and its environment, political consequences, problem of administrative implementation, institutional and organizational aspects, problems of coordination, the determination of relative priorities, timetables for action in programming, and evaluation and overview requirements.". Dalam penyelesaian kebijakan publik, pemerintah sangat memperhatikan dengan seksama cara- cara/tahap-tahap bagaimana menyelesaikan masalah publik dengan sangat baik. Tahap-tahap itu menurut starling mencakup antara lain: memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul, implementasi, koordinasi, evaluasi, dan juga masalah kebijakan-kebijakan yang ada.

Ketiga, kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Definisi kebijakan publik yang termasuk ke dalam sudut pandang ini ialah Wilson dalam Hayat 2018 : 20, yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi. Yang lebih penting, khususnya sejak periode pasca perang PD-II, kata policy mengandung makna kebijakan sebagai sebuah rationally, sebuah manifestasi dari penilaian yang penuh pertimbangan. Pengertian ini mengandung makna bahwa terdapat nilai-nilai yang fundamental yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Di sini tentu campur tangan pemerintah terhadap rakyatnya sangat terasa ketika pemerintah berusaha menerapkan rencanannya yang bertujuan politik tersebut (dengan menerapkan nilai-nilai/mengintervensi rakyatnya).

Keempat, kebijakan sebagai democratic government. Kebijakan sebagai democratic goverment adalah adanya interaksi antara negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik.

Definisi kebijakan publik yang masuk dalam klasifikasi *democratic government* ialah Woll dalam Hayat 2018 : 21, mengungkapkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu:

1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat;
2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat;
3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di sini terdapat interaksi antara pemerintah dengan rakyat melalui politisi ataupun yang lainnya dalam rangka mengatasi persoalan publik secara bersama. Interaksi tersebut dilakukan karena mengingat kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah nantinya akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Demokrasi dalam proses tersebut sangat terasa ketika rakyat diijinkan untuk turut andil dalam pembuatan kebijakan melalui perwakilan, seperti politisi, pegawai pemerintah, ataupun yang lainnya yang mana dekat dengan pemerintah pusat.

Sementara Chief J.O. Udoji dalam Hayat 2018 : 21, mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large."* Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Semakin pemerintah

memperhatikan kepentingan rakyatnya (dalam usaha pemerintah menuju sistem yang demokratis), maka semakin banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Maka dari itu, suatu tindakan bersanksi pun akhirnya muncul di dalamnya, artinya jika pemerintah salah dalam mengambil suatu keputusan maka rakyat banyaklah yang jadi taruhannya.

Oxfoerd English Dictionary, memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai: "Political sagdacity, statecraft, prudent conduct, craftiness, course of action adopted by government, party, atc." Salah satu kamus sinonim yang memberikan definisi sebagai berikut: *"policy, statesmanship, administration, wisdom, plan, role, action, tactics, strategy, sagacity."* Maksudnya ialah kebijakan politik, keterampilan suatu negara bagian, pemimpin yang bijaksana, kecakapan sebagai negarawan, kebijaksanaan, rencana, aturan main, aksi/tindakan, taktik-taktik, strategi, merupakan arah suatu tindakan yang diadopsi oleh pemerintah, partai, dll. Hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, khususnya ketika dirinya akan menyelesaikan suatu persoalan publik dan memerlukan berinteraksi dengan rakyatnya. Dalam pemerintahan yang demokratis, hal-hal seperti di atas pun menjadi penting untuk ada dan/ dimiliki.

Dari definisi-definisi yang sudah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan juga bahwa:

1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
2) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.

3)Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Warga Negara sebagai bagian dari suatu Negara, sangat menaruh banyak harapan kepada Negara. Karena dengan hal ini Negara diharapkan akan memberikan pelayanan terhadap apa yang menjadi kepentingan warga negaranya. Mengingat bahwa kepentingan tersebut sangat beragam dan terus mengalami dinamika, maka Negara harus senantiasa mengetahui apa yang menjadi masalah dimasyarakat dan menetapkan solusinya. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud dari

perhatian Negara terhadap kepentingan publik serta dalam rangka penyelenggaraan fungsi pelayanan public. Pola yang digunakan oleh Negara dalam memecahkan permasalahan public ini kemudian dirumuskan dalam kebijakan Negara, ada baiknya bagi kita pahami terlebih dahulu pengertian kebijakan secara umum.

Kebijakan memiliki arti yang bermacam-macam menurut para ahli. Menurut PBB, kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Sedangkan menurut Anderson dalam Hayat 2018 : 22 kebijakan merupakan perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, maupun instansi pemerintah) atau serangkain actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu untuk melakukan sesuatu.

Nugroho, dalam Hayat 2018 : 22 berpendapat bahwa kebijakan Negara adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan) dan UUD 1945 yaitu Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan hokum dan semata-mata bukan karena kekuasaan dalam mengantar kehidupan bersama untuk mencapai tujuan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Suatu kebijakan Negara juga dirumuskan dan diimplementasikan oleh instansi pemerintah, kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintahan daerah. Sejalan dengan pandangan Nugroho dalam Hayat 2018 : 22 kebijakan Negara yang memerlukan penjelasan atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Beberapa penjelasan yang dikemukakan di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan Negara, yang dalam hal ini akan menunjukkan ciri-ciri yang melekat dalam konsep tersebut. Diharapkan sebauha keputusan dapat dikatakan sebagai kebijakan Negara jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Bahwa kebijakan Negara itu lebih merupakan suatu tindakan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
2) Bahwa kebijakan Negara pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri serta mengarah kepada tujuan tertentu.
3) Bahwa kebijakan Negara itu saling bersangkutan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4) Bahwa kebijakan Negara itu mungkin berbentuk positif atau pula berbentuk negatif.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Negara merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi

plemerintah untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan bersama, baik berupa Undang-undang maupan peraturan-peraturan.

**b. Tujuan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah umum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Terlalu banyak masalah, perbedaan, dan keparahan. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik dapat menghasilkan kebijakan publik. Hanya masalah publik yang membuat orang berpikir dan mencari solusi yang dapat menghasilkan kebijakan publik (hanya yang memotivasi orang untuk bertindak menjadi masalah politik). Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Namun dalam proses kebijakan publik perlu diperhatikan siapa yang berhak merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja kebijakan publik.

Suatu kebijakan akan memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, kebijakan merupakan solusi dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada secara keseluruhan, bukan untuk memecahkan masalah dengan menciptakan yang baru. Namun dengan kebijakan ini, permasalahan yang ada dapat teratasi dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kebijakan publik dapat dilihat dari alternatif-alternatif yang dibuat dalam kebijakan tersebut. Dalam kebijakan publik terdapat banyak alternatif pilihan, sehingga pilihan kebijakan merupakan

kebijakan yang terbaik diantara alternatif-alternatif lainnya. Atau lebih baik dari yang lebih baik.

Tujuan kebijakan dapat berupa politik, ekonomi, sosial atau hukum. Secara politis, kebijakan publik ditetapkan untuk distribusi dan alokasi nilai, berupa barang dan jasa, kepada seluruh anggota masyarakat. Berkenaan dengan kekuasaan, kebijakan publik diatur agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat dan kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

**c. Ciri-Ciri Kebijakan**

Anderson (Zainal Abidin, 2016:4) mengemukan ciri-ciri dari kebijakan publik sebagai berikut:

1) Setiap kebijakan mesti ada tujuan. Artinya, membuat kebijakan tidak boleh asal buat atau hanya sekedar ada kesempatan membuatnya.
2) Suatu kebijakan tidak boleh berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorientasi pada pelaksanaan, interprestasi dan penegak hukum.
3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah bukan apa yang akan atau diinginkan pemerintah.
4) Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan
5) Kebijakan didasarkan pada hukum karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat agar mematuhinya.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

**d. Proses Kebijakan Publik**

Michael Howlet dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2015:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu:

1) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2) Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3) Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4) Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

**e. Tingkatan Kebijakan Publik**

Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah procedural Deddy Mulyadi (2016:37-38) yaitu "Berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya". Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yaitu:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

1) Pertama adalah kebijakan publik menurut maknanya, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan:
2) Kedua adalah kebijakan publik menurut bentuknya, peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis/konvensi.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi. Contoh-contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan atau Keputusan Walikota/Bupati.

**f. Tahap-Tahap Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat induk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn yang dikutip dalam buku Sahya Anggara (2016 :120-121) adalah sebagai berikut:

1) Penyusun Agenda *(agenda setting)*

Penyusun agenda adalah sebuah fase yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ini ditetapkan dan

dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan masukan dan memilah masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.Dalam proses seleksi ini apa saja yang bisa dikatakan dalam kategori sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda yang akan dipertimbangkan.Jika sebuah isu berhasil mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting dalam menentukan suatu isu publik yang diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan *(policy issues)* sering disebut juga dengan sebagai masalah kebijakan *(policy problem). Policy issues* biasanya muncul karena adanya silang pendapat antara aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karaktermasalah tersebut. Menurut William Dunn isu kebijakan merupakan produk atau fungsi adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.

Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman serius, telah mencapai partikulasi tertentu yang berdampak dramatis, menpatkan dukungan dari media massa, menjangkau dampak yang amat luas mempermasalahkan

kekuasaan serta menyangkut suatu persoalan yang sulit dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Penyusun agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esesnsi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2) Formulasi Kebijakan *(policy formulating)*

Masalah yang sudah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalahnya. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masuk dalam agenda kebijakan, dalam masalah untuk tahap perumusan masing-masing kebijakan yang diambil untuh pemecah masalah.

3) Penyusun Agenda *(policy adoption)*

Tujuan legetimasi ialah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitemasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan dari pemerintah.

4) Penyusun Agenda *(policy implementation)*

Pada tahap ini alternatif pemecah masalah yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini suatu kebijakan sering ditemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terrencana dapat berbeda saat dilapangan.Hal ini

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

5) Penyusun Agenda *(policy evaluation)*

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

6) Tahap Adopsi/Legetimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintah disonansi. Legitimasi dan dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

7) Tahap Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi, dan dampak.

Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

Jadi, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ada 4 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik meliputi tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut saling berkaitan untuk mencapai pembuatan kebijakan yang baik dan maksimal.

**g. Syarat-Syarat Kebijakan**

Syarat-syarat kebijakan yaitu:

1) Kondisi eksternal tidak menimbulkan kendala yang serius
2) Tersedianya waktu
3) Tersedianya sumber-sumber
4) Kebijakan didasari oleh hubungan kausalitas
5) Hubungan ketergantungan harus kecil
6) Pembaharuan yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
7) Tugas terperinci dan penempatan yang tepat
8) Kommunikasi dan koordinasi yang sempurna

**2. Implementasi**

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan terwujudnya suatu gagasan. Seseorang atau pelaku pemerintahan harus menerapkan atau mengimplementasikan suatu ide

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Implementasi merupakan proses yang ditempuh atau dilaksakan diberbagai bidang tanpa adanya batasan apapun. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu program, maka perlu adanya kesiapan atas semua keperluan dilapangan. Implementasi sering diremehkan, dianggap hanya pelaksanaan dari program-program yang telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan, seolaholah tahapan ini kurang berpengaruh. Implementasi kebijakan dianggap penting dan harus dilakukan. Seperti yang kita ketahui kebijakan tidak akan memberikan dampak apapun tanpa adanya penerapan atau pelaksanaan. Kebijakan hanya sebagai dokumen atau program yang tidak bermakna bagi kehidupan. Suatu kebijakan yang dinilai baik dan tepat pun tidak akan memberikan perubahaan apapun bila tidak diimplementasikan.

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi suatu kebijakan memiliki peranan yang penting bagi jalannya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang Langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Menurut Grindle dalam Dian 2022 : 120, implementasi merupakan proses tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dan proses implementasi dapat dimulai apabila tujuan dan target dalam suatu program telah ditentukan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan dari suatu kebijakan dan realisasinya dalam proses pelaksanaan pemerintahan sangat berhubungan. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dimasyarakat serta menciptakan kesejahteraan. Dan dalam pengimplementasiannya pemerintahan harus sudah mempersiapkan apa program kan kegiatan seperti apa yang mampu memberikan solusi bagi suatu masalah yang terjadi.

Hal ini sesuai dengan sudut pandang dari Van Meter dalam Dian, 2022 : 121-122, dan Van Horn bahwa tugas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudkan tujuan dari kebijakan publik yang diterapkan melalui tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas instansi pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini, implementasi dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum atau publik. Suatu kebijakan dapat dilihat seberapa manfaat dan dampaknya ababila telah diimplementasikan atau diterapkan terhadap kebijakan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

tersebut. Implementasi merupakan tindakan lanjutan atau eksekusi setelah proses perencanaan kebijakan.

Menurut Jones dalam Dian, 2022 : 121, mengemukakan terdapat beberapa dimensi dalam pelaksaan pemerintah yang berkaitan erat dengan program yang telah disahkan, kemudian menentukan implementasinya dan membahas stakeholder yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan Dengan demikian, proses implementasi mencakup aktivitas-aktivias merujuk pada penempatan suatu progam yang berdampak, meliputi 3 tindakan utama dalam implementasi kebijakannya, yakni :

1) Interpretasi. Interpretasi disini bertindak dalam memberikan makna atau penafsiran sebuah program atau kebijakan yang dirasa harus ada dan pengimplementasiannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak.
2) Organisasi atau instansi. Organisasi disini sebagai unit/ tempat menempatkan kebijakan agar dapat diterima.
3) Aplikasi. Aplikasi ini berhubungan erat dengan perlengkapan yang dibutuhkan guna mendukung pelayanan.

Sesuai dengan beberapa poin tersebut, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan admninistratif yang bertanggungjawab dalam menjalankan kebijakan atau program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok, tetapi juga dalam menyangkut jaringan kekuatan ekonomi, politik dan sosial yang kemudian akan mempengaruhi perilaku stakeholder yang terlibat yang

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

akhirnya akan memberikan pengaruh baik itu yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (negative effect).

Kemudian menurut Subianto, dalam Dian 2022 : 122-123, menyebutkan terdapat beberapa unsur dalam dalam proses implementasi yakni:

1) Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan.
2) Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau bisa saja gagal. Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcome, karena didalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang 7tentu saja berpengaruh dan bersifat mendukung ataupun menghambar pencapaian target sasaran kebijakan.
3) Didalam proses pelaksanaan kebijakan, sekurnagkurangnya terdapat 3 unsur penting dan mutlak, yakni: a) Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan. b) Target Groups atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini diartikan sebagai target suatu kebijakan yang telah ditetapkan. c) Unsur pelaksana (Implementor).
4) Implementasi program tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril. Sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan.

Pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen termasuk dalam kerangka organizing-leading-controlling. Maka, ketika sebuah kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya yakni mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan kebijakan dan juga melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Hal lain yang patut dikemukakan sebagai latar belakang kecenderungan untuk mengkaji secara mendalam mengenai "Implementasi kebijakan" yakni pengalaman perencanaan pembangunan di negara-negara berkembang, oleh Donald P Warwick dalam Subianto, 2020 : 16-17, disebut diselimuti "mitos-mitos" *(mythos),* yang tidak sesuai dengan "kenyataan-kenyataan" *(realistis)* yang sebenarnya. Banyak pengalaman pembangunan membuktikan bahwa ditinjau dari segi "Implementasi" proses perencanaan sama pentingnya dengan "produk perencanaan". Dalam kamus, Webster merumuskan bahwa *implement* (Implementasi) adalah to provide te means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Menurut P. Sabatier & Mazmanian, dalam Subianto, 2020 : 17 Implementasi Kebijakan adalah: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwaperistiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa".

Selanjutnya Wahab, S. A., dalam Subianto, 2020 : 17 menjelaskan bahwa: "Fungsi Implementasi Kebijakan yakni untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai *"outcome"* (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, karenanya fungsi implementasi juga mencakup penerusan 'apa' yang dalam ilmu kebijakan *(policy science)* dikenal dengan sebutan *"Policy Delivery System"* (Sistem penyampaian penerusan kebijakan) yang mencakup dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara spesifik serta diarahkan menuju terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan."

Berdasarkan berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni:

1) Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapantahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.
2) Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau "outcomes", karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni: a. Adanya program (atau kebijakan). b. Target Groups. c. Unsur pelaksana (implementor).
4) Implementasi program atau kebijaksanaan, tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril, sehingga faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *"Those Activities directed toward putting a program into effect"* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *"Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy"* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu Implement. Dalam kamus, Implementas berarti

menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi Implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.

Implementasi yang dikemukakan oleh para ahli dapat memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ada beberapa teori implementasi, yang diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

1)Teori Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2020: 150-153). Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di

tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan

para agen pelaksanananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteris-tik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap atau Kecenderungan *(Disposition)* Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari *(agen)* pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' *(top down)* yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan

sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2)Teori Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (Leo Agustino, 2020: 163-167). Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a) Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

i. Kesukaran-kesukaran Teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Di samping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

ii. Keberagaman Perilaku yang Diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus

dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (aparatur, administratur, atau birokrat) di lapangan.

iii. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

iv. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

v. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

i. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

ii. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

iii. Ketetapan Alokasi Sumber Dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

iv. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka kordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

v. Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan-badan Pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memper-kecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mem-pengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

vi. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top-down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

vii. Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelasanan yang ditunjuk oleh pemrintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

b) Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang. undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

i. Dukungan Publik.

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungang dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelasanaan kebijakan publik di lapangan.

ii. Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang

dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

iii. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakan publik.

3) Teori George C. Edward III (dalam Agusino, 2016:136) Mengungkapkan "Implementasi kebijakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak ada persiapan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak terwujud". Ada empat varabel yang mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan kepada masyarakat implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Agar bisa menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya

Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut bisa berupa sumberdaya dari manusia yang, kompetensi implementor,dan sumberdaya finansial.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokatis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating).

4) Implementasi Kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle (Subarsono, 2021:93)". Dipengaruhi oleh dua variabel besar yang saling mempengaruhi, yaitu:

Isi Kebijakan

a) Kepentingan kelompok sasaran

b) Tipe manfa

c) Derajat perubahan yang diingikan

d) Letak pengambilan keputusan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

e) Pelaksanaan program

f) Sumberdaya yang dilibatkan.

Lingkungan Implementasi.

a) Kekuasan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
b) Karakteristik lembaga dan penguasa
c) Kepatuhan dan daya tangkap

5) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2021:101). Terdapat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang diterapkan dan apabila mengetahui kegagalan dan keberhasilannya suatu kebijakan pemerintah dapat mendorong upaya tersebut dalam bentuk program. Ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi,yaitu:

a) Kondisi Lingkungan
b) Hubungan Antar Organisasi
c) Sumber Daya
d) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana.

6) Teori Mazmanian dan Sabatier (Leo Agustino,2020:163). Mengungkapkan “Implentasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur implementasi". Ada tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi,yaitu:

a) Logika Kebijakan
b) Lingkungan Kebijakan

c) Kemampuan Implementor Kebijakan

Dengan beberapa pendapat teori diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan lebih mengarah pada suatu aktivitas atau kegiatan yang dinamis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program atau menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan menetapkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas Penulis bisa menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan program, pelaksanaan peraturan perundang-undang maupun pelaksanaan kebijakan dalam bentuk perintah seperti peraturan presiden, peraturan menteri dan lain-lainnya. dengan ketetapan oleh undang-undang maupun pemerintah untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan, instrumen apa saja yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktu dimulai maupun berakhirnya pelaksanaan yang harus dilakukan.

Donald P. Warwick (1979) dalam Subianto (2020: 50) dalam karyanya Integrating Planning and Implementation: “A Transactional Approach” mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kemampuan organisasi, dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Ada tiga komponen utama yang diyakini dapat membentuk kapabilitas atau kemampuan organisasi, antara lain:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

a. Kemampuan teknis;
b. Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain;
c. Sistem pelayanan "SOPs" (Standar Operating Procedures), yang merupakan pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi, komponen informasi menjadi penting karena kurangnya pengetahuan dapat berdampak pada kebijakan secara keseluruhan.
3. Dukungan, kurangnya objek kebijakan "terikat" dengan tugas/kewajiban tertentu, kemudian kepatuhan juga akan berkurang jika ketentuan dalam kebijakan yang ada bertentangan dengan keyakinan atau penilaian yang sebelumnya dibuat.
4. Pembagian potensi, hambatan dapat terjadi apabila terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang masih kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan pembatasan yang ambigu serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan teori Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A (Subarsono, 2021:94) Menurut pandangannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu:

a) Karakteristik dari masalah

Dalam hal ini dilihat bagaimana permasalahan yang terjadi, apakah termasuk permasalahan secara sosial bisa dipecahkan atau secara teknis sulit untuk dipecahkan. Karakteristik masalah terdiri dari:

i. Tingkat kesulitan teknis dari masalah

Dalam hal ini bisa dilihat bagaimana permasalahan terjadi,apakah termasuk permasalahan sosial yang secara teknis mudah diselesaikan atau masuk kategori masalah sosial yang secara teknis sulit untuk dipecahkan.

ii. Pemahaman masyarakat

Dalam artinya bahwa suatu program akan lebih mudah di-implementasikan jika program mudah diimplementasikan apa bila jumlahnya banyak mudah untuk dimengerti.

iii. Cakupan perubahan perilaku yaang diharapkan

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b) Karakteristik Kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Karakteristik kebijakan yang terdiri atas:

i. Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelasdan rinci isi sebuahkebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.

ii. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis

Kebijakan memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji. Namun karena konteks dalam pembuatan kebijakan adalah menyangkut sosial akan tetapi dilingkungan sosial tertentu ada beberapa berpedaan sehingga untuk mengatasinya hanya perlu memodifikasi.

iii. Besarnya alokasi sumberdaya finansial

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administasi yang semuanya itu perlu biaya.

iv. Seberapa besar keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana

Suatu program akan sukses implementasinya jika koordinasi yangKejelasan dan konsistensi aturanImplementor sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi agar tidak terjadi kerancuan yang menyebabkan kegagalan pengimplementasian.

v. Kejelasan dan konsistensi aturan

Implementor sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi agar tidak terjadi kerancuan yang menyebabkan kegagalan pengimplementasian.

vi. Tingkat komitment

Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan atau kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima.

vii. Luas akses kelompok

Suatu program yang memberikan peluang bagi masyrakat untuk terlibat akan mendapatkan dukungan dari pada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayah.

c) Variabel Lingkungan

Sebuah program akan mengalami kesulitan apabila cakupannya terlalu luas dan kompleks. Sebaliknya, implementasi program akan mengalami kemudahan apa bila cakupan tidak luas dan kompleks.Terdiri atas:

i. Kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosial yang sederhana dapat dikatakan masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup.

ii. Dukungan publik

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya yang bersifat disinsentif tidak mendapat dukungan dari publik.

iii. Sikap dari kelompok

Kelompok pemilik yang ada didalam masyarakat dapat mempengaruhi yang ada dalam masyarakat melalui dengan dua cara yaitu, kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan dan kelompok pemili dapat memilki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana.

iv. Tingkat ketrampilan

Aparat badan pelaksana harus memilki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

**3. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

**a. Pengertian**

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa secara digital, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Siskeudes merupakan aplikasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk pengelolaan keuangan desa. Siskeudes membantu pemerintah desa dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan, meliputi:

1) Membantu menyusun RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
2) Memudahkan pencatatan dan pelaporan realisasi anggaran.
3) Membantu dalam pembukuan dan pencatatan transaksi keuangan.
4) Memfasilitasi penyusunan laporan keuangan desa.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

5) Memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat.

Sistem ini dirancang untuk memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siskeudes adalah sistem aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat.

Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

**a. Tujuan dan Manfaat**

1) Tujuan

a) Efisiensi: Mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan desa.

b) Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran desa.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

c) Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.

2) Manfaat

a) Kemudahan: Mempermudah proses pengelolaan keuangan desa.

b) Pengendalian Internal: Dilengkapi dengan sistem pengendalian internal (built-in internal control).

c) Sesuai Peraturan: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Informasi Terpadu: Menyediakan informasi keuangan yang terpadu dan mudah diakses.

Pemerintah daerah harus mengajukan permohonan penggunaan Siskeudes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Setelah disetujui, BPKP dan Kemendagri akan memberikan kode SML Pemda untuk mengoordinasikan penggunaan Siskeudes di seluruh desa. Penggunaan Siskeudes secara komprehensif dan lengkap, mencakup semua tahapan pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan Siskeudes secara menyeluruh, pemerintah desa dapat:

1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
3) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.
4) Memudahkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

## C. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang terjadi yaitu Kurangnya fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet dan printer, hal ini menyebabkan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kantor Desa Sungai Pandan Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami keterlambatan dalam membuat laporan keuangan desa yang mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia atau aparat Desa serta Kurangnya pelatihan dan pengembangan. Penelitian ini dijelaskan melalui teori yang dikembangkan oleh Teori Implementasi menurut George C. Edward III (dalam Agusino, 2016:136) yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang akan dijelaskan pada Gambar berikut ini :

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI

**Gambar 2. 1**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

